



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2014 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2014.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0% (enam koma nol persen). Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, iklim investasi yang semakin kondusif, dan membaiknya kinerja ekspor. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Selain itu, kondisi ekonomi makro juga diperkirakan membaik dan stabil. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai

tukar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah tersebut mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2014 dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2014, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5% (lima koma lima persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 5,5% (lima koma lima persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2014 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$105,0 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 870 (delapan ratus tujuh puluh) ribu barel per hari, sedangkan *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) ribu barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun.

RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, dan tahun 2014 merupakan tahun kelima dalam agenda RPJMN tahap kedua. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2005–2009), RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam RPJMN tahap kedua (2010–2014), kegiatan pembangunan akan

diarahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 disusun berdasarkan tema "Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan" dan diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu: (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya meliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c) bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2014.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam. Guna mewujudkan hal dimaksud, Pemerintah meningkatkan langkah-langkah koordinasi antar instansi di Pemerintah, termasuk penegak hukum dalam rangka menindak tegas kegiatan *illegal mining* di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta pelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki ijin resmi. Selain itu, dalam rangka menanggulangi kendala yang timbul dalam penyerapan penerusan pinjaman, seperti masalah perijinan dan pembebasan lahan, selain meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Penerimaan SDA non migas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan. Adapun penerimaan SDA non migas yang bersumber dari sektor perikanan diharapkan menjadi sumber utama penerimaan negara pada APBN tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan diversifikasi dan optimalisasi penerimaan SDA non migas sektor perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH ini termasuk PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.312.382.021.731.200,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua belas triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.280.388.970.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp385.391.728.955.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp113.711.676.218.000,00 (seratus tiga belas triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBPN Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp40.851.886.418.000,00 (empat puluh triliun delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

c. subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.713.230.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah); dan
- d. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp210.735.506.000.000,00 (dua ratus sepuluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam juta rupiah), subsidi listrik sebesar Rp71.364.809.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp21.048.845.142.000,00 (dua puluh satu triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), subsidi pangan sebesar Rp18.822.515.311.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp1.564.800.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp194.121.885.271.800,00 (seratus sembilan puluh empat triliun seratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kriteria kinerja tertentu” adalah daerah yang berprestasi, yaitu antara lain:

- a. daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya; dan
- b. daerah yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan subsidi BBM jenis tertentu, Pemerintah secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2014 menerapkan pola subsidi tertutup dalam penyaluran BBM bersubsidi sebagai upaya pembatasan volume BBM bersubsidi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Subsidi listrik tahun 2014 didasarkan dengan pemberian margin usaha sebesar 7% (tujuh persen) kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Dalam anggaran belanja lain-lain APBN 2014 dicadangkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp10.407.547.000.000,00 (sepuluh triliun empat ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan bagian 5% (lima persen) dari margin sebesar 7% (tujuh persen) yang diberikan kepada PT PLN (Persero). Penggunaan dana cadangan subsidi listrik tersebut melalui persetujuan Badan Anggaran DPR RI.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik. Di samping itu, Pemerintah juga mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “asumsi dasar ekonomi makro” adalah harga minyak mentah (ICP) dan/atau nilai tukar rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan “parameter subsidi energi” adalah volume konsumsi BBM bersubsidi.

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar perhitungan yang digunakan dalam rangka penerapan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 adalah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk dalam “dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga” di antaranya:

1. pemenuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1. pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga.
2. keperluan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP, sebagai akibat:

1. kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;
2. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;
3. adanya satuan kerja PNBP baru;
4. diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan
5. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satuan kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui

dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, (b) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2014 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2014 setelah APBN

Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Anggaran Pendidikan sebesar Rp368.899.059.983.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	130.279.572.499.000,00
Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	130.279.572.499.000,00
1.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	80.661.026.761.000,00
1.2 Kementerian Agama	42.566.934.663.000,00
1.3 Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7.051.611.075.000,00
1.3.1 Kementerian Keuangan	678.219.290.000,00
1.3.2 Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00
1.3.3 Kementerian Perindustrian	421.438.189.000,00
1.3.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	78.500.000.000,00
1.3.5 Kementerian Perhubungan	1.700.000.000.000,00
1.3.6 Kementerian Kesehatan	1.320.890.800.000,00
1.3.7 Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00
1.3.8 Kementerian Kelautan dan Perikanan	252.485.000.000,00
1.3.9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00
1.3.10 Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00
1.3.11 Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00

1.3.12 Kementerian Pertahanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

1.3.12 Kementerian Pertahanan	131.016.596.000,00
1.3.13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00
1.3.14 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	310.000.000.000,00
1.3.15 Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00
1.3.16 Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.865.200.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	238.619.487.484.000,00
2.1 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	982.482.550.000,00
2.2 DAK Pendidikan	10.041.300.000.000,00
2.3 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	135.644.273.026.000,00
2.4 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	1.853.600.000.000,00
2.5 Tunjangan Profesi Guru (TPG)	60.540.700.000.000,00
2.6 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	4.094.631.908.000,00
2.7 Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000,00
2.8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24.074.700.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beberapa komponen Pembiayaan Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- b. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- c. Pemerintah menerbitkan SBN dengan kombinasi *tenor* yang baik serta melakukan *reprofiling* utang jika diperlukan agar profil jatuh tempo (*maturity profile*) SBN tetap mendukung keberlanjutan fiskal.

d. Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- f. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau panjang sektor perumahan.
- g. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal.
- h. PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.
- i. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia digunakan untuk meningkatkan kapasitas modal guna mendukung program ekspor nasional.
- j. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.

k. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- k. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- l. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "krisis pasar SBN domestik" adalah kondisi krisis pasar SBN berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol (CMP)*) pasar SBN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis.

Krisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT PLN (Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “entitas terjamin” adalah pihak yang memperoleh jaminan Pemerintah.

Ayat (3)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Dana yang telah diakumulasikan dalam rekening cadangan penjaminan Pemerintah tersebut dapat digunakan untuk membayar Kewajiban Penjaminan antar program penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri” adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya lanjutan penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2014;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan
4. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

Ayat (3)

Pelaksanaan transaksi lindung nilai dapat menimbulkan biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah.

Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pembayaran bunga utang.

Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pengeluaran cicilan pokok utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tatacara penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri digunakan dalam rangka kesinambungan pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (5)

Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2009 pada satuan kerja berstatus BLU yang secara sistem telah mampu melaksanakannya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Ayat (7)

Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 39

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, PNBP, ANGGARAN TRANSFER KE
DAERAH, DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

I. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP
1. RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

1. Pendapatan pajak dalam negeri	1.226.474.170.684.000,00
1.1 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	586.306.470.234.000,00
1.1.1 Pendapatan PPh migas	76.073.625.000.000,00
1.1.1.1 Pendapatan PPh minyak bumi	30.311.276.000.000,00
1.1.1.2 Pendapatan PPh gas bumi	45.762.349.000.000,00
1.1.2 Pendapatan PPh nonmigas	510.232.845.234.000,00
1.1.2.1 Pendapatan PPh Pasal 21	116.824.900.384.000,00
1.1.2.2 Pendapatan PPh Pasal 22	10.370.314.557.000,00
1.1.2.3 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	50.014.271.180.000,00
1.1.2.4 Pendapatan PPh Pasal 23	37.309.965.250.000,00
1.1.2.5 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	7.355.441.000.000,00
1.1.2.6 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	174.763.737.200.000,00
1.1.2.7 Pendapatan PPh Pasal 26	39.022.027.000.000,00
1.1.2.8 Pendapatan PPh final	74.515.960.373.000,00
1.1.2.9 Pendapatan PPh nonmigas lainnya	56.228.290.000,00
1.2 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	492.950.875.000.000,00
1.3 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	25.441.872.000.000,00
1.4 Pendapatan cukai	116.284.000.000.000,00
1.4.1 Pendapatan cukai	116.284.000.000.000,00
1.4.1.1 Pendapatan cukai hasil tembakau	110.700.000.000.000,00
1.4.1.2 Pendapatan cukai ethyl alkohol	200.000.000.000,00
1.4.1.3 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	5.384.000.000.000,00
1.5 Pendapatan pajak lainnya	5.490.953.450.000,00
2. Pendapatan pajak perdagangan internasional	53.914.800.000.000,00
2.1 Pendapatan bea masuk	33.936.600.000.000,00
2.2 Pendapatan bea keluar	19.978.200.000.000,00

2. RINCIAN PNBP

1. Penerimaan sumber daya alam	225.954.696.223.000,00
1.1 Penerimaan sumber daya alam migas	196.508.274.000.000,00
1.1.1 Pendapatan minyak bumi	142.943.079.000.000,00
1.1.2 Pendapatan gas alam	53.565.195.000.000,00
1.2 Penerimaan sumber daya alam nonmigas	29.446.422.223.000,00
1.2.1 Pendapatan pertambangan mineral dan batubara	23.599.745.000.000,00
1.2.1.1 Pendapatan iuran tetap	1.071.826.000.000,00
1.2.1.2 Pendapatan royalti	22.527.919.000.000,00

1.2.2 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1.2.2	Pendapatan kehutanan	5.017.016.000.000,00
1.2.2.1	Pendapatan dana reboisasi	2.440.000.000.000,00
1.2.2.2	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.790.444.000.000,00
1.2.2.3	Pendapatan IIUPH (IHPH)	146.250.000.000,00
1.2.2.3.1	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	11.250.000.000,00
1.2.2.3.2	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	135.000.000.000,00
1.2.2.4	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	640.322.000.000,00
1.2.3	Pendapatan perikanan	250.000.001.000,00
1.2.4	Pendapatan panas bumi	579.661.222.000,00
1.2.4.1	Pendapatan pertambangan panas bumi	564.850.000.000,00
1.2.4.2	Pendapatan iuran tetap pertambangan panas bumi	14.811.222.000,00
2.	Pendapatan bagian laba BUMN	40.000.000.000.000,00
2.1	Pendapatan laba BUMN perbankan	10.300.000.000.000,00
2.2	Pendapatan laba BUMN non perbankan	29.700.000.000.000,00
3.	PNSP lainnya	94.087.605.717.000,00
3.1	Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan	31.538.985.208.000,00
3.1.1	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	17.367.147.273.000,00
3.1.1.1	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	6.848.075.000,00
3.1.1.2	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	22.102.468.000,00
3.1.1.3	Pendapatan penjualan hasil tambang	16.066.526.027.000,00
3.1.1.4	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	50.000.000.000,00
3.1.1.5	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi Lainnya	195.000.000,00
3.1.1.6	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	16.231.482.000,00
3.1.1.7	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelclangan	65.792.000,00
3.1.1.8	Pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar murni	1.200.000.000.000,00
3.1.1.9	Pendapatan penjualan lainnya	5.178.429.000,00
3.1.2	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	129.436.240.000,00
3.1.2.1	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	50.549.430.000,00
3.1.2.2	Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin	33.848.578.000,00
3.1.2.3	Pendapatan penjualan sewa beli	20.000.000.000,00
3.1.2.4	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	25.038.232.000,00
3.1.3	Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	13.733.362.500.000,00
3.1.3.1	Pendapatan minyak mentah (DMO)	13.446.700.000.000,00
3.1.3.2	Pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas	286.662.500.000,00
3.1.4	Pendapatan dari pemanfaatan BMN	309.039.195.000,00
3.1.4.1	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	213.557.306.000,00
3.1.4.2	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	69.780.517.000,00
3.1.4.3	Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan	235.820.000,00
3.1.4.4	Pendapatan dari KSP tanah, gedung,	

dan bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	dan bangunan	500.000.000,00
	3.1.4.5 Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya	24.965.552.000,00
3.2	Pendapatan jasa	30.978.493.357.000,00
3.2.1	Pendapatan jasa I	16.909.228.739.000,00
3.2.1.1	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	44.372.778.000,00
3.2.1.2	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	23.109.033.000,00
3.2.1.3	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	2.203.341.600.000,00
3.2.1.4	Pendapatan hak dan perijinan	10.928.806.714.000,00
3.2.1.5	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	218.028.367.000,00
3.2.1.6	Pendapatan jasa, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan pendapatan DJBC	656.731.300.000,00
3.2.1.7	Pendapatan jasa kantor urusan agama	82.250.670.000,00
3.2.1.8	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	993.151.358.000,00
3.2.1.9	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.759.436.919.000,00
3.2.2	Pendapatan jasa II	984.151.709.000,00
3.2.2.1	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	58.669.655.000,00
3.2.2.2	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	745.032.938.000,00
3.2.2.3	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00
3.2.2.4	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	624.000.000,00
3.2.2.5	Pendapatan bea lelang	129.438.841.000,00
3.2.2.6	Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara	40.290.000.000,00
3.2.2.7	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	6.070.000.000,00
3.2.3	Pendapatan jasa luar negeri	517.382.070.000,00
3.2.3.1	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	404.123.083.000,00
3.2.3.2	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	103.158.086.000,00
3.2.3.3	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	10.100.901.000,00
3.2.4	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/atau jasa penempatan uang negara	6.200.000.000.000,00
3.2.4.1	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	195.000.000.000,00
3.2.4.2	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	6.005.000.000.000,00
3.2.5	Pendapatan jasa kepolisian I	4.329.332.750.000,00
3.2.5.1	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	1.007.057.710.000,00
3.2.5.2	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	1.202.885.925.000,00
3.2.5.3	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	64.701.800.000,00
3.2.5.4	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.171.452.260.000,00
3.2.5.5	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	848.808.480.000,00
3.2.5.6	Pendapatan ujian keterampilan	

mengemudi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	mengemudi melalui simulator	32.172.700.000,00
3.2.5.7	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.253.875.000,00
3.2.6	Pendapatan jasa kepolisian II	403.262.253.000,00
3.2.6.1	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	63.907.725.000,00
3.2.6.2	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	59.241.510.000,00
3.2.6.3	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	11.831.200.000,00
3.2.6.4	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	268.281.818.000,00
3.2.7	Pendapatan jasa lainnya	1.635.135.836.000,00
3.2.7.1	Pendapatan jasa lainnya	1.615.773.252.000,00
3.2.7.2	Pendapatan bea lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	2.593.266.000,00
3.2.7.3	Pendapatan bea lelang pegadain	16.769.318.000,00
3.3	Pendapatan bunga	9.089.773.181.000,00
3.3.1	Pendapatan bunga	1.106.494.192.000,00
3.3.1.1	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.106.310.000.000,00
3.3.1.2	Pendapatan bunga lainnya	184.192.000,00
3.3.2	Pendapatan premium atas obligasi negara	7.983.278.989.000,00
3.4	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	137.743.590.000,00
3.4.1	Pendapatan legalisasi tanda tangan	3.593.255.000,00
3.4.2	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	661.385.000,00
3.4.3	Pendapatan uang meja (<i>leges</i>) dan upah pada panitera badan pengadilan (<i>peradilan</i>)	6.319.345.000,00
3.4.4	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	104.310.770.000,00
3.4.5	Pendapatan ongkos perkara	732.000,00
3.4.6	Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi	2.000.000.000,00
3.4.7	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	20.858.103.000,00
3.5	Pendapatan pendidikan	2.775.932.606.000,00
3.5.1	Pendapatan uang pendidikan	1.762.088.665.000,00
3.5.2	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	126.719.701.000,00
3.5.3	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	80.443.041.000,00
3.5.4	Pendapatan pendidikan lainnya	806.681.199.000,00
3.6	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	71.343.500.000,00
3.6.1	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	38.961.500.000,00
3.6.2	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	3.100.000.000,00
3.6.3	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	29.282.000.000,00
3.7	Pendapatan iuran dan denda	672.269.692.000,00
3.7.1	Pendapatan iuran badan usaha	600.000.000.000,00
3.7.1.1	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00
3.7.1.2	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00
3.7.2	Pendapatan dari perlindungan hutan	

dan konservasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3.1.9 Pertanian	2.579.560.000.000,00
3.1.10 Lingkungan Hidup	548.100.000.000,00
3.1.11 Keluarga Berencana	462.910.000.000,00
3.1.12 Kehutanan	558.460.000.000,00
3.1.13 Sarana Perdagangan	730.990.000.000,00
3.1.14 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	754.740.000.000,00
3.1.15 Energi Perdesaan	467.940.000.000,00
3.1.16 Perumahan dan Permukiman	234.800.000.000,00
3.1.17 Keselamatan Transportasi Darat	235.940.000.000,00
3.1.18 Transportasi Perdesaan	301.340.000.000,00
3.1.19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	493.070.000.000,00
3.2 Dana Alokasi Khusus Tambahan	2.800.000.000.000,00
3.2.1 Infrastruktur Jalan	1.691.130.000.000,00
3.2.2 Infrastruktur Irigasi	633.980.000.000,00
3.2.3 Infrastruktur Air Minum	245.210.000.000,00
3.2.4 Infrastruktur Sanitasi	229.680.000.000,00

2. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

1. Dana Otonomi Khusus	16.148.773.028.000,00
2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	523.875.000.000,00
3. Dana Penyesuaian	87.948.647.900.000,00
3.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah	60.540.700.000.000,00
3.2 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah	1.853.600.000.000,00
3.3 Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000,00
3.4 Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2)	91.847.900.000,00
3.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24.074.700.000.000,00

III. RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

1. RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

1. Perbankan dalam negeri	4.398.460.306.000,00
1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.398.460.306.000,00
2. Nonperbankan dalam negeri	191.859.576.477.000,00
2.1 Hasil pengelolaan aset	1.000.000.000.000,00
2.2 Surat berharga negara neto	205.068.831.000.000,00
2.3 Pinjaman dalam negeri neto	963.045.000.000,00
2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	1.250.000.000.000,00
2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-286.955.000.000,00
2.4 Dana investasi Pemerintah	-14.105.617.523.000,00
2.4.1 Penyertaan modal negara (PMN)	-5.005.617.523.000,00
2.4.1.1 PMN kepada BUMN	-3.000.000.000.000,00
2.4.1.1.1 PT Askrindo dan Perum Jamkrindo	-2.000.000.000.000,00

2.4.1.1.2 PT Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2.4.1.1.2	PT Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00
2.4.1.2	PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-585.617.523.000,00
2.4.1.2.1	Asian Development Bank (ADB)	-390.538.924.000,00
2.4.1.2.2	International Bank for Reconstruction And Development (IBRD)	-149.435.099.000,00
2.4.1.2.3	International Finance Corporation (IFC)	-14.143.500.000,00
2.4.1.2.4	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-31.500.000.000,00
2.4.1.3	PMN Lainnya	-1.420.000.000.000,00
2.4.1.3.1	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-420.000.000.000,00
2.4.1.3.2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-1.000.000.000.000,00
2.4.2	Dana bergulir	-4.000.000.000.000,00
2.4.2.1	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00
2.4.2.2	Pusat Pembiayaan Perumahan	-3.000.000.000.000,00
2.4.3	Cadangan Pembiayaan	-5.100.000.000.000,00
2.5	Kewajiban penjaminan	-1.066.682.000.000,00
2.5.1	Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	-1.017.886.000.000,00
2.5.2	Percepatan penyediaan air minum	-2.113.000.000,00
2.5.3	Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-46.683.000.000,00

2. RINCIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NETO

1. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	39.132.741.421.000,00
1.1 Pinjaman program	3.900.000.000.000,00
1.2 Pinjaman proyek	35.232.741.421.000,00
1.2.1 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	34.006.463.491.000,00
1.2.1.1 Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga	30.980.720.725.000,00
1.2.1.2 Pinjaman Proyek Diterushibahkan	3.025.742.766.000,00
1.2.2 Penerimaan Penerusan Pinjaman	1.226.277.930.000,00
2. Penerusan pinjaman	-1.226.277.930.000,00
2.1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-529.854.070.000,00
2.2 PT Sarana Multi Infrastruktur	-210.000.000.000,00
2.3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-24.150.000.000,00
2.4 PT Pertamina (Persero)	-252.404.919.000,00
2.5 Pemerintah Kota Bogor	-12.498.941.000,00
2.6 Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-30.000.000.000,00
2.7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-167.370.000.000,00
3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.810.000.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten-Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Lydia Silvanna Djaman